PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Selasa Tanggal: 11 Agustus 2015 Halaman: 16

Anggaran Jamkesda Dinilai Masih Mencukupi

YOGYAKARTA — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta menilai alokasi dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 2015 masih mencukupi. Dengan begitu, Dinkes tidak akan mengajukan kebutuhan penambahan alokasi dana Jamkesda pada APBD Perubahan (APBD-P) tahun ini.

"Tidak ada pengajuan penambahan anggaran karena dana yang tersedia masih cukup," kata Kepala Dinkes Kota Yogyakarta Fita Yulia, Senin (10/7). Menurut dia, mekanisme pengelolaan yang berjalan sekarang pun lebih efisien, sehingga memudahkan dinasnya dalam mengelola anggaran.

Pada tahun anggaran 2015, Fita mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengalokasikan dana sebesar Rp 27,9 miliar untuk membayar klaim biaya pelayanan kesehatan dari 26 rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinkes setempat. Hingga akhir semester pertama, kata dia, total klaim yang dibayarkan oleh UPT Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (PJKD) Kota Yogyakarta ke seluruh institusi pelayanan kesehatan mencapai Rp 7,76 miliar. Terkecuali untuk Rumah Sakit Jogja yang baru dibayarkan hingga Mei.

Fita mengatakan, dana tersebut digunakan untuk membiayai 127.162 pasien dengan berbagai keluhan penyakit yang ditanggung oleh Jamkesda. Menurut dia, rata-rata UPT PJKD membayar klaim sebesar Rp 1,2 miliar per bulan. Jika hingga akhir tahun anggaran dana yang dimiliki tidak cukup untuk membayar klaim dari rumah sakit, kata dia, maka pemerintah akan membayarkannya pada tahun anggaran berikutnya. "Jika ada kelebihan dana, maka akan langsung masuk ke kas daerah," ujar dia.

Rata-rata UPT PJKD membayar klaim sebesar Rp 1,2 miliar per bulan.

Pengguna layanan Jamkesda ini, menurut Fita, merupakan masyarakat miskin, serta warga Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan tidak memiliki jaminan kesehatan apa pun. Warga Kota Yogyakarta yang memiliki KTP, kata dia, dapat mengakses layanan kesehatan tanpa dipungut biaya. Sekarang ini, menurut Fita, sudah banyak juga warga yang beralih memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Sehingga tanggungan dari pemerintah kota semakin berkurang," kata dia.

Pemkot Yogyakarta memastikan program Jamkesda ini masih akan tetap berjalan hingga 2016. Sementara itu, anak dari keluarga peserta JKN dari penerima bantuan iuran (PBI) juga sudah ditanggung oleh Pemerintah DIY. Anak tersebut ditanggung hingga berusia 18 tahun.

■ antara ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. UPT. Jamkesda	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005